

Peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan desa berbasis inklusi sosial

Ragil Tri Atmi^{1*}, Endang Gunarti², Fitri Mutia³, Ismi Choirunnisa Prihatini⁴

¹Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, email: ragil.tri.atmi@fisip.unair.ac.id

²Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, email: endang.gunarti@fisip.unair.ac.id

³Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, email: fitri.mutia@fisip.unair.ac.id

⁴Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, email: ismi.choirunnisa.prihatini-2017@fisip.unair.ac.id

*Koresponden penulis

Info Artikel

Diajukan: 2022-03-13

Diterima: 2022-10-09

Diterbitkan: 2022-10-22

Keywords:

literacy; social inclusion;
village library

Kata Kunci:

literasi; inklusi sosial;
perpustakaan desa



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2022 Ragil Tri Atmi,
Endang Gunarti, Fitri Mutia, Ismi
Choirunnisa Prihatini

Abstract

Social inclusion-based libraries are an important agenda in organizing library transformation programs, especially village libraries. The Gresik Government seeks to improve the role and function of village libraries in its area by supporting community literacy improvement programs. This program is to strengthen literacy in realizing community welfare by making the village library a means of activities and learning. The target of this program is 27 pilot village libraries in Gresik Regency. This community service uses PAR (Participatory Action Research) method to see and understand social phenomena related to development of village libraries. The ultimate goal of this program is an increase literacy in increasing the reading interest of the village community. As for the implementation, this program has following methods: 1). Preparation; 2). Implementation; 3). Focus Group Discussion; 4). Monitoring; 5). Evaluation. The result of this program is that participants who take part the training get more knowledge and skills to be applied in village libraries to support the development of social inclusion-based village libraries. These findings indicate that this service program can increase knowledge of village library management and disseminate technical skills are important for sustainability of village libraries based on social inclusion.

Abstrak

Perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi agenda penting dalam menyelenggarakan program transformasi perpustakaan khususnya perpustakaan desa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan desa di wilayahnya dengan mendukung program peningkatan literasi masyarakat. Pengabdian masyarakat kepada masyarakat dilakukan untuk penguatan literasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan perpustakaan desa sebagai sarana kegiatan dan belajar. Sasaran program ini adalah 27 perpustakaan desa percontohan di Kabupaten Gresik. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode PAR (Participatory Action Research) untuk melihat dan memahami gejala sosial terkait pengembangan perpustakaan desa. Adapun implementasinya, program ini telah melakukan metode-metode: 1). Persiapan; 2). Pelaksanaan; 3). Focus Group Discussion (FGD); 4). Monitoring; 5). Evaluasi. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari program ini adalah adanya peningkatan literasi dalam meningkatnya minat baca masyarakat desa. Hasil program pengabdian ini adalah peserta yang mengikuti pelatihan mendapatkan pengetahuan serta skill yang lebih terasah untuk diterapkan dalam perpustakaan desanya untuk mendukung pengembangan

perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa program pengabdian ini dapat menambah pengetahuan manajemen perpustakaan desa dan menyebarkan keterampilan teknis yang penting untuk keberlanjutan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Cara mensitasi artikel:

Atrmi, R. T., Gunarti, E., Mutia, F., & Prihatini, I. C. (2022). Peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 5(3), 486–497. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i3.15559>

PENDAHULUAN

Perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi salah satu agenda pemerintah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan masyarakat desa di Indonesia. Sejak tahun 2015 sampai saat ini melalui perpustakaan pemerintah konsen mengoptimalkan pengembangan program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Program ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat desa untuk mendapatkan informasi maupun pengetahuan melalui bacaan-bacaan buku yang disediakan oleh perpustakaan serta menstimulusi keterlibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan (Gutama & Widiyahseno, 2020). Oleh karena itu, perpustakaan desa diharapkan mampu mendukung perubahan dan kemajuan masyarakat. Untuk mendukung perubahan, perpustakaan desa saat ini dituntut untuk dapat melakukan transformasi agar mampu berperan dan berfungsi sebagai sarana kegiatan dan belajar masyarakat sepanjang hayat. Konsep inklusi sosial perlu dipromosikan dan disosialisasikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran baik dari kalangan akademisi maupun praktisi untuk saling mendukung pemberdayaan masyarakat. Ketika semua masyarakat sudah saling bahu membahu dalam memberdayakan satu sama lain maka akan terciptanya suasana di mana masyarakat yang saling menyukai, mengayomi, dan percaya sehingga dapat mudah untuk mencapai tujuannya (Mahdi, 2020).

Dalam rangka untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan masyarakat desa dan daerah, Bappenas dan Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan program transformasi perpustakaan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa anggaran yang tersedia dalam program pembangunan desa juga harus digunakan untuk membangun perpustakaan desa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat desa semakin gemar membaca. Hal tersebut menunjukkan pentingnya desa memiliki perpustakaan sebagai sarana pembelajaran dan kegiatan bagi masyarakat dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas tersebut untuk Masyarakat (Heriyati et al., 2020). Pada program transformasi perpustakaan, pemerintah mengambil model yang digunakan untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan masyarakat desa dan daerah. Model yang digunakan yang kini dikembangkan oleh pemerintah yakni perpustakaan berbasis inklusi sosial, dengan menjadikan program penguatan literasi untuk kesejahteraan masyarakat (Rohman et al., 2015). Menurut Utami & Prasetyo (2019) pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Sehingga dapat dimaknai bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial yakni perpustakaan yang

menawarkan jasa layanan informasi yang terbuka kepada masyarakat dengan berbagai perbedaan latar belakang, status, etnik, maupun karakteristik untuk mengembangkan potensi diri dalam peningkatan ekonomi.

Salah satu perubahan yang dilakukan yakni dalam hal minat baca. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), Indonesia memiliki minat baca yang sangat rendah yaitu hanya 0,001% (Perpusnas, 2021). Oleh karena itu adanya program transformasi perpustakaan desa diharapkan mampu mendorong perubahan pada masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera dalam hal minat baca. Bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan desa juga perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ciri khas masyarakat desa. Terkait adanya program transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial untuk memenuhi pembangunan berkelanjutan masyarakat desa dan daerah, dengan demikian, perpustakaan berbasis inklusi sosial harus mengembangkan layanannya agar relevan dengan kebutuhan sosial semua lapisan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi individu (Komariah et al., 2021).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik telah berupaya untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan desa di wilayahnya. Dari total jumlah 330 desa yang ada di Kabupaten Gresik hanya 116 desa yang memiliki perpustakaan desa. Sehingga saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik mengembangkan perpustakaan yang berjumlah 126 perpustakaan dan 27 diantaranya sebagai perpustakaan percontohan. Diantara perpustakaan desa tersebut merupakan perpustakaan desa yang berprestasi dan menjadi nominator di tingkat nasional (Diskominfo Gresik, 2021). Hal ini tentu sebagai aset di Bidang literasi dan sebagai tantangan untuk perpustakaan desa lainnya di Kabupaten Gresik. Hal ini menjadi hal unik karena Kabupaten Gresik selalu mendukung program peningkatan dan sebagai mitra dalam pengembangan perpustakaan desa.

Kondisi perpustakaan desa percontohan masih beragam, namun setidaknya perpustakaan yang dijadikan percontohan telah memiliki ruangan, sejumlah koleksi meskipun belum sesuai dengan standard perpustakaan, juga pengelola perpustakaan desa. Perpustakaan desa percontohan ini mendapat bimbingan dari Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Gresik. Pentingnya bimbingan untuk pengelola perpustakaan membantu masyarakat dalam meningkatkan literasi dasar, seperti yang telah disepakati dalam komunikasi dan interaksi masyarakat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Dari 27 perpustakaan desa percontohan, ada 10 perpustakaan yang sudah paham, dan 3 perpustakaan percontohan yang sangat paham terkait perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Kabupaten Gresik. Salah satu perpustakaan desa percontohan yang sudah menerapkan inklusi sosial dengan baik, yakni Perpustakaan Desa Rumah Pelangi berada di Desa Suci. Perpustakaan desa Rumah Pelangi sudah menyediakan koleksi atau bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga mengadakan program-program yang menarik agar masyarakat berkunjung ke Rumah Pelangi. Perpustakaan Desa Rumah Pelangi pernah mendapatkan

penghargaan Nasional sebagai contoh “*best practice*” sehingga dapat memberikan inspirasi untuk perpustakaan desa lainnya dapat lebih baik.

Permasalahan lain yang hadir yakni kemampuan pengelolaan perpustakaan-perpustakaan dan kualitas pelayanan perpustakaan. Selain itu juga ruang publik bagi masyarakat desa di wilayah Gresik masih kurang maksimal, hal ini membuat fungsi dan keberadaan perpustakaan menjadi tidak optimal. Pelatihan yang digagas ini juga, diharapkan kemampuan teknis pustakawan dalam mengelola perpustakaan baik dalam melakukan analisis, mengenali kebutuhan pemustaka, membeli dan inventarisasi koleksi buku, meningkatkan literasi masyarakat, serta melakukan pelayanan terhadap pemustaka berbasis inklusi sosial.

Berdasarkan pelatihan tersebut, pengelola perpustakaan diharapkan mampu membuat program-program literasi, membuat layanan berbasis inklusi sosial serta menyediakan bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga, perpustakaan desa dapat memberikan layanan secara maksimal, dan masyarakat nantinya juga dapat memanfaatkan perpustakaan desa dengan optimal. Karena perpustakaan adalah sumber informasi utama masyarakat untuk mendukung terciptanya kemakmuran masyarakat (Asnawi, 2015). Dalam hal ini pustakawan sebagai pengelola perpustakaan desa, sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat berkelanjutan, seharusnya memiliki kemampuan teknis dan wawasan yang memadai terkait dengan Literasi berbasis inklusi sosial sehingga pustakawan dapat mengembangkan keragaman koleksi, serta membuat program-program terobosan untuk meningkatkan literasi masyarakat, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbagai pelatihan telah dilaksanakan, namun untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan program berkelanjutan yang dapat mendekatkan perpustakaan desa sebagai perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan juga sebagai pusat pengembangan masyarakat. Dengan adanya program ini untuk menginisiasi pelatihan literasi berbasis inklusi sosial, agar para pustakawan desa memiliki wawasan terkait kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh Daerahnya. Berbekal pengetahuan ini, Pustakawan Desa diharapkan mampu untuk mengenali potensi daerahnya, sehingga semua koleksi juga arah pengembangan program akan sesuai dengan kemampuan ataupun potensi daerahnya, sehingga kesejahteraan masyarakat akan cepat tercapai.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode PAR (*Participatory Action Research*) untuk melihat, mendengar dan juga memahami gejala sosial terkait pengembangan perpustakaan desa di Kabupaten Gresik. Dalam metode PAR ini, cara pandang penulis sebagai pembuat program kegiatan melihat masyarakat atau ‘kelompok sasaran’ sebagai subjek dan bukan sebagai objek kegiatan (Qulloh, 2021). Tujuan akhir dari kegiatan penelitian, perencanaan, dan pengembangan dengan metode PAR ini adalah adanya peningkatan literasi dalam meningkatnya minat baca masyarakat desa. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan para pustakawan untuk memahami masyarakat

yang dilayani, sehingga mampu untuk membuat program literasi, program layanan juga mengarahkan pengembangan koleksinya pada kebutuhan masyarakat yang dilayani. Adapun implementasinya, program ini telah melakukan metode-metode: 1). Melakukan persiapan pemetaan dan identifikasi masalah serta administrasi; 2). Pelaksanaan program dengan dua acara yaitu sosialisasi dan pelatihan; 3). *Focus Group Discussion* (FGD) sesuai dengan hasil analisis masalah yang dilakukan bersama para subyek dampingan; 4). Monitoring; 5). Evaluasi Program. Seperti yang diutarakan oleh Pratiwi & Heriyanto (2022) bahwa keberhasilan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilaksanakan melalui proses konsep, strategi dan target.

Tahap persiapan dilaksanakan dengan melaksanakan observasi oleh tim untuk melakukan pengamatan terkait kondisi perpustakaan desa di Wilayah Gresik, dengan begitu tim dapat mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi pengelola perpustakaan desa, agar tim dapat menyusun materi yang akan disajikan nantinya. Pada metode observasi, tim juga melaksanakan prosedur perizinan oleh pihak Universitas Airlangga pada Dispersip Kabupaten Gresik dan Perpustakaan-perpustakaan Desa di Wilayah Kabupaten Gresik. Dan juga, selama observasi, tim melakukan tukar informasi dengan pihak mitra secara *online*.

Tahap kedua yaitu pelaksanaan program yakni berupa sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan tim untuk pengelola perpustakaan desa Wilayah Gresik. Dalam pelaksanaan pelatihan ini terdapat dua materi, yang dibagi menjadi dua sesi pelatihan. Pada sesi pertama, tim menyajikan terkait menganalisis literasi masyarakat dan mengembangkan keragaman koleksi untuk mendukung literasi masyarakat. Lalu, pada sesi kedua, perihal kemampuan teknis pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial dalam melakukan pelayanan kepada pengguna. Adanya pelatihan yang diberikan tim, yakni hasil dari observasi yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga tim dapat memberikan materi sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh pengelola perpustakaan desa Wilayah Gresik. Dari pelatihan yang diberikan ini bertujuan untuk dapat mengatasi terkait pengembangan layanan dan pengembangan koleksi perpustakaan desa.

Selanjutnya, setelah dilaksanakan pelatihan sebanyak dua materi selama dua sesi yang telah disajikan oleh tim. Metode pelaksanaan berikutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi komunikasi video yang di pandu oleh tim juga. Dari adanya metode FGD ini bertujuan antar pengelola perpustakaan desa Wilayah Gresik dapat bertukar pikiran, berdiskusi mengenai permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sehingga adanya FGD ini dapat membantu tim menemukan persoalan yang sedang dihadapi oleh pengelola perpustakaan desa. Melalui FGD ini monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pelatihan dan pendampingan dapat dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program diawali dengan adanya sosialisasi dan pemaparan materi terkait peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan berbasis

inklusi sosial. Kegiatan dihadiri oleh peserta pelatihan yang terdiri dari pengelola perpustakaan desa di wilayah Gresik. Pada pemaparan ini dijelaskan terkait pentingnya peningkatan literasi untuk masyarakat desa. Selain itu dijelaskan pula bagaimana pengelola perpustakaan berperan aktif dalam layanan berbasis inklusi sosial yang mana dapat memberikan ruang kepada masyarakat dari berbagai kalangan dan memiliki hak yang sama untuk belajar dan akses informasi. Hal ini sesuai dengan konteks perpustakaan berbasis inklusi sosial dimaknai bahwa Perpustakaan lebih dari sekedar tempat untuk menulis dan membaca namun sebagai sarana untuk mengembangkan potensi masyarakat sekitar (Purwantini et al., 2021).



Gambar 1. Pemaparan pemateri terkait peningkatan literasi masyarakat pada perpustakaan berbasis inklusi sosial

Pada Gambar 1 pemateri menjelaskan secara detail agar dapat diterima dengan baik dan dapat diimplementasikan pada perpustakaan desa. Perlu difahami bahwa eksklusi sosial biasanya berkaitan dengan individu atau kelompok yang diblokir atau diisolasi dari berbagai sumber daya yang biasanya tersedia bagi anggota masyarakat lainnya (misalnya perumahan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dll), atau kadang-kadang terkait partisipasi dalam masyarakat (Alphonse et al., 2007; Walsh et al., 2017). Di banyak masyarakat, karena berbagai faktor seperti kurangnya akses ke internet, kemiskinan, atau bahkan karena usia atau ras, orang dapat dengan mudah merasa dikucilkan dari komunitasnya masing-masing. Diharapkan para pengelola perpustakaan dapat membuat inovasi layanan yang dapat meningkatkan literasi masyarakat di sekitar serta dapat menerapkan inklusi sosial dengan maksimal.

Program selanjutnya adalah pelatihan teknis dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Agenda pertama adalah pemaparan materi oleh dosen yang ahli di bidangnya sehingga mendukung dalam teknis pelaksanaan pelatihan (gambar 2). Materi yang dijelaskan adalah terkait pengembangan koleksi, pengembangan layanan, dan terkait layanan pemustaka yang tidak kalah penting. Diharapkan sebagai pengelola mengembangkan layanannya sesuai dengan perkembangan yang pesat dan merancang layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.



Gambar 2. Sosialisasi dan pelatihan teknis pengembangan layanan perpustakaan

Mengenai hasil dari adanya pelatihan yang telah diberikan oleh tim melalui beberapa metode yang digunakan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan tim pengabdian pada indikator kemampuan pengembangan koleksi, pengelola perpustakaan dalam kategori sedang. Dapat diartikan bahwa kemampuan pengelolaan perpustakaan desa percontohan ini kurang memiliki kemampuan terkait dengan mengidentifikasi, memilih ataupun mencari sumber-sumber dimana informasi itu dapat diperoleh. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana pengelola dapat mengklasifikasikan bahan pustaka yang ada.

Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan desa relatif sedikit dikarenakan koleksi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat saja. Sehingga, pengembangan koleksinya masih tergolong sedang. Koleksi perpustakaan tidak hanya buku namun juga bahan non-buku seperti mainan edukatif. Koleksi non-buku dapat berupa koleksi khusus anak yaitu mainan edukatif seperti puzzle alfabet, susun ring, lego, horse ball, blokus, dan permainan tradisional congklak edukatif (Komariah et al., 2021), globe, peta, audio visual, mainan dan taman bermain anak-anak yang luas (Husna et al., 2021). Pada gambar 3 tim memberikan koleksi mainan edukatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program literasi.



Gambar 3. Penyerahan simbolik mainan edukatif

Pada hasil survey yang didapatkan di lokasi tentang kemampuan pengelolaan perpustakaan desa ini tidak bisa diterapkan, karena pengelola

tidak pernah mendapatkan dana secara rutin untuk dikelola secara mandiri. Hal ini terlihat dari koleksi yang tersedia merupakan bantuan dari Perpustakaan Nasional melalui Dispersip Kabupaten Gresik. Selain itu, mereka juga mendapatkan koleksi dari sumbangan dari lembaga maupun perorangan yang mempunyai perhatian terhadap perpustakaan. Tetapi hal ini tidak terjadi pada perpustakaan percontohan Rumah Pelangi, karena pada perpustakaan tersebut pengelola mampu membuat jejaring dengan beberapa perusahaan melalui CSR-nya untuk mendapatkan suntikan dana yang cukup besar, sehingga mampu mengidentifikasi, memiliki ataupun mencari sumber-sumber cukup bagus, dan sangat mendukung kebutuhan informasi pada masyarakatnya.

Pada indikator pengembangan layanan yang dilakukan oleh perpustakaan desa percontohan seperti mempromosikan, membuat program-program terkait membaca dan kegiatan kreatif untuk masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat untuk membangun keterampilan berdasarkan potensi masyarakat, berbagi informasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat untuk berkreasi dan saling belajar, memberikan dukungan dan saran yang praktis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari adanya pengembangan layanan tersebut melalui mempromosikan program-program kepada masyarakat, perpustakaan percontohan ini sudah mampu mengembangkan program-program yang dimiliki.



Gambar 4. Tim mengklasifikasikan koleksi bahan pustaka perpustakaan desa

Pada gambar 4 tim mengklasifikasikan koleksi bahan pustaka perpustakaan sebagai upaya untuk membantu dan memberikan pelatihan secara teknis. Dalam upaya peningkatan literasi masyarakat perlu untuk memperhatikan pengembangan koleksi di perpustakaan. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap lembaga informasi. Kebutuhan masyarakat terhadap informasi adalah landasan utama perpustakaan berdiri. Sehingga pengembangan koleksi perpustakaan perlu karena berkaitan dengan proses pengembangan dan pemberdayaan diri untuk meningkatkan mutu dan kualitas hidup (Prasetyawan & Suharso, 2015). Pengembangan koleksi dan pengembangan layanan adalah upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat baik literasi informasi ataupun literasi digital.

Keterampilan dalam mengelola informasi seperti menggunakan komputer atau internet merupakan yang harus dimiliki masyarakat era *industry 4.0* (Komariah et al., 2021).

Terkait anggaran untuk pengembangan koleksi dan layanan, dijelaskan bahwa pengelolaan perpustakaan desa sudah dianggarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjelaskan bahwa dana desa tersebut dapat digunakan untuk penguatan budaya literasi desa, yakni salah satunya untuk pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa. Adanya anggaran untuk pengelolaan perpustakaan desa, dimaksudkan untuk memberikan peningkatan dalam fasilitas, sumber daya manusia maupun pengelola perpustakaan, namun dalam kenyataannya, anggaran tersebut belum sampai ke pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Gresik, sehingga pengelola perpustakaan desa belum dapat secara maksimal dalam melakukan pengelolaan perpustakaan desa, dalam lingkup koleksi maupun layanan yang dimilikinya. Layanan untuk menunjang konsep inklusi sosial adalah layanan yang berorientasi kepada pengguna dan tidak menimbulkan eksklusivitas. Karena perpustakaan masih dinilai sebagai organisasi eksklusif dengan berbagai hambatan dalam mengakses informasi untuk kalangan tertentu (Lo et al., 2018).

Dijelaskan terkait anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa, dalam Rakornas bidang Perpustakaan tahun 2021 di 22 Maret 2021 menjelaskan bahwa "Perpustakaan yang berada di desa paling tidak, saat ini sudah mulai fokus memuat literasi-literasi yang berkaitan dengan pembangunan untuk peningkatan ekonomi" (Perpusnas, 2021), namun kenyataannya, anggaran yang sudah dianggarkan oleh Kemendes PDTT masih belum sampai pada lingkup Kabupaten Gresik, sehingga pengelola perpustakaan desa di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya mampu menjalankan dan fokus pada pembangunan berkelanjutan masyarakat desa dan daerah, diantaranya transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Karena adanya inklusi sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan yang ada (Adriyana & Cahyaningtyas, 2022).



Gambar 5. Dokumentasi tim dengan peserta

Akhir dari kegiatan adalah dokumentasi bersama dengan peserta pelatihan (gambar 5). Kemudian dilanjutkan sosialisasi terkait *Focus Group Discussion* (FGD) dan teknis pelaksanaannya yang dilakukan secara daring sebagai sarana evaluasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan semua tahapan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelola Perpustakaan Desa di Kabupaten Gresik, khususnya 27 Perpustakaan Desa Percontohan memiliki pengelola perpustakaan yang layak untuk dikembangkan baik pada pengembangan jenis dan keragaman koleksinya, juga pengembangan layanan, promosi, dan berbagi pengetahuan pada masyarakat yang dilayani. Selanjutnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini diperlukan untuk peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan desa untuk semakin meningkatkan profesionalitasnya sebagai pengelola informasi, dan juga perlu untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan pengelola perpustakaan desa.

Adapun saran yang dapat diberikan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Wilayah Gresik, berdasarkan paparan dan simpulan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh tim, maka ada beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan. Bahwa perlunya penambahan keberadaan perpustakaan desa di Kabupaten Gresik, seperti yang diketahui bahwa masih 116 perpustakaan desa dari 330 desa yang ada, lalu untuk tim perlu adanya evaluasi secara intensif dan komitmen agar kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat kedepannya dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya, untuk seluruh pihak yang bergabung perlu adanya komitmen untuk mendorong terwujudnya hasil keputusan Rakornas bidang Perpustakaan terkait penggunaan Dana Desa dapat dipergunakan untuk penguatan budaya literasi desa, salah satunya melalui pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa, untuk memasukkan mata anggaran tersebut dalam mata anggaran pengembangan masyarakat Kabupaten Gresik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Departemen Informasi dan Perpustakaan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Gresik beserta jajarannya yang telah memberikan izin guna terselenggaranya kegiatan dengan tema “Peningkatan Literasi Masyarakat Melalui Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan Desa Kabupaten Gresik”.

DAFTAR RUJUKAN

- Adriyana, L., & Cahyaningtyas, D. F. (2022). The Importance of Rural Library Services Based on Social Inclusion in Indonesia. In *Handbook of Research on the Role of Libraries, Archives, and Museums in Achieving Civic Engagement and Social Justice in Smart Cities*. IGI Global Publisher of Time Knowledge. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-8363-0.ch010>
- Alphonse, M., George, P., & Moffatt, K. (2007). Redefining social work

- standards in the context of globalization: Lessons from India. *International Social Work*, 51(2), 145–158. <https://doi.org/10.1177/00208728070858>
- Asnawi. (2015). Perpustakaan Desa Sebagai Sumber Layanan Informasi Utama. *Media Pustakawan*, 22(3), 40–46. <https://doi.org/10.37014/medpus.v22i3.210>
- Diskominfo Gresik. (2021). *Perpustakaan Desa Sukoanyar Cerme Nominator Wakil Jawa Timur di Kancah Nasional*. <https://gresikkab.go.id/berita/173-perpustakaan-desa-sukoanyar-cerme-nominator-wakil-jawa-timur-di-kancah-nasional>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>
- Heriyati, P., Kalumbang, Y. P., Dewanti, R., & Johan. (2020). Village Library for Sustainable Community Empowerment Program Case: Village Library at Tirtomoyo Village Pakis, Malang District, East Java. *International Conference on Biospheric Harmony Advanced Research (ICOBAR 2020)*.
- Husna, A. N., Yuliani, D., Rachmawati, T., Angraini, D. E., Anwar, R., & Utomo, R. (2021). Program Literasi Digital untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang. *Community Empowerment*, 6(2), 156–166. <https://doi.org/10.31603/ce.4259>
- Komariah, N., Saepudin, E., & Rukmana, E. N. (2021). Pelayanan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Perpustakaan Desa Jendela Dunia Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 17(1), 112–127. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.1298>
- Mahdi, R. (2020). Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur). *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(2), 201–215. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>
- Perpusnas. (2021). *Rakornas Bidang Perpustakaan 2021: Kuatkan Peran Perpustakaan dalam Transfer Pengetahuan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. <https://www.perpusnas.go.id/news-detail.php?lang=id&id=210322024648sRanzJoZq3>
- Prasetyawan, Y. Y., & Suharso, P. (2015). Inklusi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Perpustakaan Desa. *ACARYA PUSTAKA: Jurnal Ilmiah Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 31–40. <https://doi.org/10.23887/ap.v1i01.7146>
- Pratiwi, E., & Heriyanto. (2022). Social Inclusion-Based Library Transformation Program. *Library Philosophy and Practice*. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6705/>
- Purwantini, A. H., Aziza, D. A., Kurniawan, A. B., Azizah, F. N., Utami, W. I., & Anggitasari, F. (2021). Optimalisasi Peran Perpustakaan Desa Donorojo Berbasis Inklusi Sosial Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3), 480–485. <https://doi.org/10.31603/ce.4348>
- Qulloh, F. I. (2021). Pengembangan Literasi Dalam Peningkatan Minat Baca Santri Pada Perpustakaan Mini Pesantren Pelajar Al-Fath Rejomulyo

- Kediri. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 1(2), 71–78. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/165>
- Rohman, A. S., Erwina, W., & Lusiana, E. (2015). Transformasi Perpustakaan Desa Untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(12), 1–5. <http://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20269>
- Utami, D., & Prasetyo, W. D. (2019). Perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk pembangunan Sosial-Ekonomi masyarakat. *VISI PUSTAKA: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan*, 21(1), 31–38. <https://doi.org/10.37014/visipustaka.v21i1.74>
- Walsh, K., Scharf, T., & Keating, N. (2017). Social exclusion of older persons: a scoping review and conceptual framework. *European Journal of Ageing*, 14(1), 81–98. <https://doi.org/10.1007/s10433-016-0398-8>